

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada satuan-satuan kerja yang berada dalam lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta membandingkan dan menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang telah dilakukan oleh satuan-satuan kerja dengan standar yang ditetapkan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta pendekatan studi kasus serta teknik analisis komparatif agar dapat menjawab permasalahan dan dapat mencapai tujuan penelitian.

Jenis data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga cara, yakni partisipasi, kajian pustaka, dan wawancara. Teknik partisipasi diwujudkan melalui kegiatan magang yang dilakukan oleh peneliti, teknik kajian pustaka dilaksanakan dengan menelaah dokumen-dokumen terkait, sedangkan teknik wawancara dilakukan langsung terhadap pengelola keuangan dari satuan kerja maupun perwakilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui teknik-teknik

tersebut, peneliti memperoleh data primer berupa hasil wawancara dengan para pengelola keuangan. Selain itu, peneliti juga memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan, catatan-catatan keuangan, pedoman akuntansi entitas, dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai subyek penelitian, dengan fokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terhimpun di dalamnya. Satuan kerja yang termasuk dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 57 entitas, yakni berupa Dinas, Badan, Biro, Kantor, Unit Pelaksana Teknis, Pengawas, dan lain-lain. Kegiatan partisipasi berupa magang dilaksanakan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku koordinator dalam hal penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah atas kelima puluh tujuh satuan kerja tersebut. Sebagai pelengkap, wawancara dilakukan terhadap pengelola keuangan di Biro Keuangan dan juga beberapa satuan kerja untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Pengamatan maupun pengumpulan data untuk keperluan penulisan skripsi ini dilakukan sejak kegiatan magang dimulai (Juli 2015) sampai dengan awal Desember 2015.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhitung sejak 1 Januari 2015.

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan sistem aplikasi berbasis komputer (SIPKD Akrua! Versi 6) dalam melaksanakan serangkaian proses akuntansinya, yang juga menghubungkan antara sistem akuntansi SKPD (entitas akuntansi) sebagai anak dengan sistem akuntansi PPKD (entitas pelaporan) sebagai induk untuk membentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. SIPKD Akrua! telah dioperasikan oleh satuan kerja, khususnya dalam proses penjurnalan, namun aplikasi tersebut belum terprogram untuk menghasilkan laporan keuangan yang utuh pada waktu tertentu.
4. Sampai dengan saat pengamatan dilakukan, proses akuntansi berbasis akrua! baru teridentifikasi dalam transaksi-transaksi yang terkait dengan penerimaan kas (penerimaan pendapatan, dan lain-lain) dan pengeluaran kas (untuk belanja dan beban serta pembayaran hutang, dan lain-lain), sedangkan untuk pos-pos akrua! yang lain seperti penyusutan aset tetap, beban dibayar dimuka, piutang, dan lain sebagainya, pencatatannya belum dilakukan oleh satuan-satuan kerja di lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, meskipun perangkat lunak telah mendukung dengan sempurna, namun laporan keuangan belum dapat digunakan sewaktu-waktu oleh pengguna maupun pihak yang berkepentingan karena belum sepenuhnya memberikan informasi akrua!.
5. Secara umum, jurnal-jurnal yang telah dicatat oleh satuan-satuan kerja telah sesuai dengan petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penomoran

akun pada buku jurnal yang telah dicatat oleh satuan kerja dengan Bagan Akun Standar (BAS) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014.

6. Meskipun dalam tahun pertama penerapan SAP Berbasis Akrua ini masih ditemukan berbagai masalah dan kendala namun secara umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaannya baik melalui dukungan pemimpin, dukungan antar entitas, pemberian sarana dan pra sarana pendukung, pemberian pelatihan teknis, rekrutmen tenaga akuntansi, dan lain sebagainya.

5.1 Keterbatasan

Penelitian ini telah dibuat berdasarkan prosedur ilmiah yang telah direncanakan sebelumnya. Namun, beberapa keterbatasan masih dialami peneliti selama proses penelitian ini berlangsung. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Penyajian laporan keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan sekali dalam setahun dan tahun saat penelitian dilakukan merupakan tahun pertama penerapan SAP sehingga data laporan keuangan yang berhasil didapatkan oleh peneliti bukan merupakan laporan keuangan yang *fix* melainkan data sementara. Hal ini menyebabkan peneliti hanya bisa menilai proses penerapan SAP saja.

2. Penyesuaian terhadap beberapa pos akrual belum dicatat oleh pengelola keuangan sehingga peneliti hanya dapat menganalisis transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal.
3. Lokasi penelitian yang berbeda dengan lokasi domisili peneliti menyebabkan adanya kesulitan dalam hal komunikasi. Namun hal ini diminimalisir oleh peneliti dengan beberapa kali melakukan kunjungan ke satuan kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi dan keadaan yang terjadi.
4. Informan wawancara dinilai masih sangat kurang karena sedikit sulit bagi peneliti untuk membuat janji wawancara mengingat kesibukan informan yang padat dan berbeda-beda.

5.2 **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai saran untuk beberapa pihak, yakni sebagai berikut.

a. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pemprov. NTT disarankan untuk tetap memberikan pelatihan secara berkelanjutan terkait penerapan SAP Berbasis Akrual terhadap para pengelola keuangan.
2. Pemprov. NTT disarankan untuk melakukan *plotting* Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan pada SKPD maupun PPKD yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dilaksanakan dengan lebih baik oleh SDM yang dapat memahaminya dengan baik.

3. Pemprov. NTT disarankan untuk terus melakukan pengembangan terhadap sistem akuntansi maupun perangkat pendukung akuntansi agar mampu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas tepat waktu, relevan, transparan, dan lain sebagainya.
4. Pemprov. NTT disarankan menelaah kembali peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman agar lebih sesuai dengan kondisi terkini.
5. Pemprov. NTT disarankan untuk menyusun laporan keuangan finansial bulanan atau setidaknya triwulanan dan semesteran seperti penyajian laporan pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan kualitas laporan yang tepat waktu dan relevan serta bermanfaat bagi pengambil keputusan.
6. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sebagai penanggungjawab laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) disarankan untuk terus belajar mengenai peraturan-peraturan terkait akuntansi yang selalu berubah-ubah secara dinamis agar menjadi lebih kreatif dan inisiatif dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawabannya tanpa harus menunggu instruksi dari Biro Keuangan selaku koordinator. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum diskusi bagi para pengelola keuangan SKPD maupun PPKD ataupun kegiatan sejenisnya.
7. PPK disarankan untuk melakukan perhitungan fisik terhadap persediaan (*stock opname*) untuk periode yang lebih singkat, misalnya bulanan atau triwulanan agar pengelolaan persediaan menjadi lebih baik, mengingat

persediaan merupakan aset lancar yang beberapa diantaranya mudah untuk dipindahtangankan.

b. Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri)

1. Pemerintah Pusat disarankan untuk melakukan perubahan petunjuk teknis Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pada hal-hal yang pada penerapannya masih belum relevan dengan peraturan tersebut.
2. Pemerintah Pusat disarankan untuk tetap memberikan bimbingan-bimbingan teknis bagi pelaksana sistem akuntansi di Daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian terhadap perlakuan pos-pos tertentu pada laporan keuangan, misalnya aset tetap, piutang, atau utang, dan lain-lain secara lebih terfokus pada satuan kerja tertentu.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan wawancara apabila menggunakan teknik yang sama dengan penelitian ini.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan kembali Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai obyek penelitian agar hasil penelitian nantinya dapat digunakan sebagai pembanding dengan penelitian ini untuk menilai perkembangan penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemprov. NTT.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Emaeilzade M., Z. Houshmand N., dan R. Abdi, "Application of Accrual Accounting in Iran Municipalities". *Management Science Letters* 5.3 (2015): 257-260.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati (2010). Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan. Edisi I. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Azrina Hani Azmi dan N. Mohamed , "Readiness of Malaysian public sector employees in moving towards accrual accounting for improve accountability: The case of ministry of education (MOE)". *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 106-111.
- Bodnar, George H., William S. Hopwood, 1996. Sistem Informasi Akuntansi, Terjemahan Amir Abadi Jusuf, Rudi M. Tambunan, Salemba Empat, Buku Satu, Jakarta.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. 1990. *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*. Penerjemah Munandir. Jakarta: PAU-PPAI.
- Bungin Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Erlita, D.S.R., Sifrid, P., dan Sherly, P., "Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* 3 no. 1 (2015).
- Friska, L., David, P.E.S., dan Stanly, W.A., "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* 3 no. 1 (2015).
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2013. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- _____. 2014. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

- _____. 2014. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- _____. 2014. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. New York: SAGE Publications.
- Ni Made, A.W., Edy, S., dan I Made, P.A., “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kabupaten Gianyar”. *JIMAT (Jurnal Imiah Mahasiswa Akuntansi)* *SI 3 no. 1* (2015).
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2014. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- _____. 2014. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- _____. 2014. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan Pemerintahan dan Bagan Akun Standar*. Kupang: Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

- Ria, V.P., Agus, T.P., dan Dhullo, A., "Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* 3 no. 1 (2015).
- Saman Mohammadi, Mohamahhdi Maher, and Sahar Zare, "Implementation of full accrual basis in governmental organizations (Case study: Shiraz University of Technology, Iran)". *INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS.*" (2012).
- Selvina, S., Lintje, K., dan Stanley, K.W., "Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tamohon". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* 3 no. 1 (2015).
- Strauss, A., & Cobin, J. 1990. *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2014. *METODOLOGI PENELITIAN: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.